



KATALOG BPS : 7103002.36

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2010-2011



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI BANTEN**

STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Financial Statistic of Regency/Municipality Government

PROVINSI BANTEN

2010 – 2011

<http://banten.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

**STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN
2010 – 2011**

**No, Publikasi : 36540.1109
Katalog BPS : 7203002.36**

<http://banten.bps.go.id>

Naskah
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit
Bidang Statistik Distribusi

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

“Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya”

**STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN 2010 – 2011**

Anggota Tim Penyusun :

Koordinator : Junjung Nuraharto, S.Si

Editor : Suwandari, S.ST

Penulis/Pengolah Data : Mabrur Ams.

<http://banten.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 – 2011 diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen data akan data statistik keuangan daerah. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data realisasi pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tahun 2010 dan 2011. Data tersebut merupakan hasil kompilasi data yang diterima dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui BPS daerah.

Dalam publikasi ini disertakan pula penjelasan tentang konsep definisi dan metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pengguna data. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para konsumen data, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang.

Serang, Oktober 2012

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Banten,

Ir. Nanan Sunandi, M.Sc.
NIP. 19530801197503 1 002

DAFTAR ISI/CONTENS

	Halaman Page
KATA PENGANTAR/PREFACE	iv
DAFTAR ISI/CONTENS	v
PENJELASAN UMUM/GENERAL EXPLANATION	1
ULASAN RINGKAS/BRIEF DESCRIPTION	12
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	
1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemda Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota / <i>Actual Income and Expenditure Of Regency/Municipality Government Throughout Province Banten By Regency/Municipality</i>	23
2.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten/ <i>Actual Receipt of Regency/Municipality Government Provincial of Banten</i>	24
2.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten/ <i>Actual Expenditure of Regency/Municipality Government Provincial of Banten</i>	25
2.1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang/ <i>Actual Receipt Government of Regency Pandeglang</i>	26
2.2.1 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Pandeglang</i>	27
2.1.2 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak/ <i>Actual Receipt Government of Regency Lebak</i>	28
2.2.2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Lebak</i>	29
2.1.3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang/ <i>Actual Receipt Government of Regency Tangerang</i>	30
2.2.3 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Tangerang</i>	31
2.1.4 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang/ <i>Actual Receipt Government of Regency Serang</i>	32
2.2.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Serang/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Serang</i>	33

2.1.5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Tangerang/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Tangerang</i>	34
2.2.5	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Tangerang/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Tangerang.....</i>	35
2.1.6	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Cilegon/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Cilegon</i>	36
2.2.6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Cilegon/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Cilegon.....</i>	37
2.1.7	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Serang/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Serang</i>	38
2.2.7	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Serang/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Serang</i>	39
2.1.8	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Tangerang Selatan</i>	40
2.2.8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Tangerang Selatan.....</i>	41

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diterbitkan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten secara rutin setiap tahun. Publikasi tahun ini menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dan 2011. Publikasi ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan terhadap data keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota terutama untuk melihat potensi daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran yang bisa dipakai untuk membuat kebijakan yang rinci dan tepat sasaran.

I.2. Ruang Lingkup Survei

Data realisasi pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dikumpulkan dari Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di tiap-tiap kabupaten/kota seluruh Provinsi Banten.

I.3. Konsep dan Definisi

Daftar isian realisasi keuangan daerah kabupaten/kota (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan menyangkut realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan keuangan kabupaten/kota yang sudah baku sesuai dengan Permendagri No 13. Berikut ini beberapa penjelasan konsep dan definisi dalam daftar isian K-2.

I.3.1. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1. Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian gol C, parkir dan lain-lain.

1.2. Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga dan sejenisnya. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek dan lain-lain.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

2.1. Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pungutan penguasaan perikanan dan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

1.3.2. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja tak langsung.
2. Belanja langsung.

1. Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

1.1. Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk di sini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

1.2. Belanja Bunga

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

1.3. Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga

tertentu, agar harga jual produksi barang / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

1.4. Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah / BUMN / BUMD, badan / lembaga / organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

1.5. Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten / kota.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.

- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya.

1.8. Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

2.1. Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

2.3. Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai

manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

1.2 Pencairan Dana Cadangan

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal / investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Saham, penanaman modal pada BUMN / BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

2.3. Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2.4. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau pihak ketiga.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

<http://banten.bps.go.id>

II. ULASAN RINGKAS

II.1. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 dan 2011 merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian di daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2011 berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto yaitu 6,43 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebesar 6,08 persen, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mengalami sedikit percepatan. Namun demikian laju pertumbuhan ekonomi provinsi tidak berarti terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik di daerah karena tidak ada imbas secara langsung laju pertumbuhan ekonomi provinsi terhadap APBD.

Secara empiris dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi bisa berfluktuasi naik dan turun sedangkan APBD cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melihat secara cermat belanja publiknya sehingga tepat sasaran.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan belanja pemerintah. Untuk mengimbangnya, pemerintah mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD harus dapat dikelola pemerintah daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah sehingga dalam upaya penggalan sumber pendapatannya pemerintah tidak mendistorsi perekonomian. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan

pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel a
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Rincian	2010	2011	Perubahan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENERIMAAN DAERAH	9,393,899,743	11,773,882,661	25.34
Pendapatan Daerah	7,940,097,355	10,848,615,831	36.63
1. Pendapatan Asli Daerah	1,129,058,864	2,246,277,774	98.95
2. Dana Perimbangan	5,677,001,123	5,816,208,819	2.45
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	1,134,037,368	2,786,129,238	145.68
Pembiayaan Daerah	1,453,802,388	925,266,831	(36.36)
B. PENGELUARAN DAERAH	9,393,899,743	11,773,882,661	25.34
Belanja Tidak Tangsung	4,413,996,187	5,121,290,913	16.02
1. Belanja Pegawai	3,796,418,021	4,527,786,636	19.26
2. Belanja Bunga	3,399,026	1,378,289	(59.45)
3. Belanja Subsidi	4,365,060	7,654,895	75.37
4. Belanja Hibah	317,479,496	320,648,772	1.00
5. Belanja Bantuan Sosial	102,941,336	132,176,778	28.40
6. Belanja Bagi Hasil	16,234,721	21,075,426	29.82
7. Belanja Bantuan Keuangan	81,334,175	79,166,868	(2.66)
8. Pengeluaran Tidak Terduga	91,824,352	31,403,250	(65.80)
Belanja Langsung	3,450,252,873	4,899,495,043	42.00
1. Belanja Pegawai	646,581,676	685,454,855	6.01
2. Belanja Barang dan Jasa	1,287,866,479	2,068,667,852	60.63
3. Belanja Modal	1,515,804,718	2,145,372,336	41.53
Pembiayaan Daerah	1,529,650,683	1,753,096,704	14.61

Sumber penerimaan yang masih menjadi sumber utama daerah untuk membiayai belanja daerah adalah dana alokasi umum (DAU). Dana transfer pemerintah pusat ini memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah. Sumber keuangan dari pemerintah daerah yang lain adalah bagi hasil pajak dan bukan pajak, bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Penerimaan daerah sesuai dengan struktur laporan keuangan terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Penerimaan daerah dalam realisasi tahun

2011 mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah tahun 2010, dari 9.393,90 miliar pada tahun 2010 menjadi 11.773,88 miliar pada tahun 2011 atau naik 25,34 persen. Dari sisi pendapatan daerah, terlihat adanya peningkatan sebesar 36,63 persen, yaitu dari 7.940,10 miliar rupiah pada tahun 2010 meningkat menjadi 10.848,62 miliar rupiah pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2011 secara agregat sebesar 2.908,52 miliar rupiah, yang dipengaruhi oleh kenaikan lain-lain pendapatan yang sah dan pendapatan asli daerah, namun demikian nilai nominal transfer pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan masih tetap mendominasi pendapatan daerah. Secara empiris, dapat ditunjukkan kenaikan lain-lain pendapatan yang sah dan pendapatan asli daerah masing-masing sebesar 1.652,09 miliar rupiah dan 1.117,22 miliar rupiah atau naik masing-masing 145,68 persen dan 98,95 persen. Walaupun lain-lain pendapatan yang sah dan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan, namun keduanya belum secara signifikan menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Sebelumnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam APBN diwujudkan melalui alokasi pengeluaran transfer ke daerah berupa subsidi daerah otonom (SDO) dan anggaran bantuan pembangunan pusat dalam bentuk inpres. Dana perimbangan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan dari 5.677,00 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 5.816,21 miliar rupiah pada tahun 2011, atau naik sebesar 2,45 persen. Dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan dampak pemekaran yang memerlukan dana operasional untuk prasarana pembangunan, dan di sisi lain daerah induk dana perimbangannya tidak mengalami penurunan yang berarti.

Mulai tahun 2007, struktur belanja pemerintah daerah berubah bukan lagi belanja publik dan aparatur, tetapi mejadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan belanja langsung dan tak langsung terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program. Jika belanja tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program maka masuk sebagai belanja tak langsung. Sebaliknya jika belanja terkait langsung dengan pelaksanaan program maka masuk pada belanja langsung. Berdasarkan struktur yang baru ini, pada tahun 2011 terjadi kenaikan dari

tahun 2010 yaitu pada belanja langsung sebesar 42,00 persen dan belanja tidak langsung sebesar 16,02 persen.

II.2. Penerimaan Daerah

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. *Pertama*, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Kedua*, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, yang terdiri dari : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. *Ketiga*, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat. *Keempat*, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Jika dilihat dari pendapatan daerah, tampak bahwa realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2011 meningkat dari realisasi pendapatan tahun 2010, Peningkatan realisasi pendapatan yang signifikan terjadi pada lain-lain pendapatan yang sah dan PAD, walaupun pendapatan daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

II.2.1. Pendapatan Daerah

II.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian kabupaten/kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga

akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta

Tabel b
Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten
Menurut Jenis Penerimaan
2010 - 2011

Jenis Penerimaan	2010	2011
(1)	(2)	(5)
PENERIMAAN	100.00	100.00
Pendapatan Daerah	84.52	92.14
1. Pendapatan Asli Daerah	12.02	19.08
1.1 Pajak daerah	5.50	13.05
1.2 Retribusi Daerah	2.92	2.88
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.80	0.49
1.4 Lain-lain PAD yang sah	2.80	2.65
2. Dana Perimbangan	60.43	49.40
2.1 Bagi Hasil Pajak	14.01	8.03
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0.06	0.10
2.3 Dana Alokasi Umum	42.48	37.87
2.4 Dana Alokasi Khusus	3.88	3.40
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	12.07	23.66
Pembiayaan Daerah	15.48	7.86

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 terhadap total penerimaan daerah mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 yaitu dari 12,02 persen menjadi 19,08 persen. Demikian juga jika dilihat dari nilai nominalnya PAD mengalami peningkatan yaitu dari 1.129,06 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 2.246,28 miliar rupiah pada tahun 2011 atau naik sebesar 98.95 persen,. Sumber utama PAD tahun 2011 adalah pajak daerah dan retribusi daerah, dengan kontribusinya masing-masing sebesar 13,05 persen dan 2,88 persen terhadap total penerimaan. Selain itu, pendapatan lain-lain juga menyumbang kontribusi sebesar 3,14 persen pada tahun 2011 Komposisi ini tidak berbeda jauh dengan sumber PAD tahun 2010.

II.2.1.2. Dana Perimbangan

Dari tabel b dapat dilihat bahwa penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota kontribusi terbesarnya disumbang dari dana perimbangan, dimana realisasi 2011 kontribusinya sebesar 49,40 persen dari total penerimaan. Komponen terbesarnya adalah DAU yaitu sebesar 37,87 persen dengan nilai nominal sebesar 4.459,05 miliar rupiah pada tahun 2011. Besarnya DAU yang ditransfer ke daerah tersebut merupakan upaya pemerintah mengurangi atau memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah yang selama ini masih terjadi. Besarnya DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri bersih setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK. Komponen berikutnya yang memberikan sumbangan terbesar kedua setelah DAU adalah bagi hasil pajak yaitu sebesar 8,03 persen dengan nilai sebesar 945,92 miliar. Secara persentase terhadap total penerimaan, kontribusi DAU dari tahun 2011 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010, namun nilai nominalnya meningkat. Sementara bagi hasil pajak mengalami penurunan baik persentase maupun nilai nominalnya. Komponen DAK memberikan kontribusi sebesar 3,40 persen, sedangkan yang menyumbang kontribusi terkecil dalam dana perimbangan adalah bagi hasil non pajak yaitu sebesar 0,10 persen.

II.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah pada realisasi tahun 2011 memberikan kontribusi terbesar kedua setelah dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah. Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan dari 1.134,04 miliar pada tahun 2010 menjadi 2.786,13 miliar rupiah pada tahun 2011 atau naik sebesar 145,68 persen. Peningkatan pendapatan ini menaikkan kontribusinya terhadap penerimaan dari 12,07 persen tahun 2010 menjadi 23,66 persen pada tahun 2011. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus yang

merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau *crisis solvability* ditambah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

II.2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan daerah pada realisasi 2011 mengalami penurunan dibandingkan pada realisasi 2010 yaitu sebesar 1.453,80 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 925,27 miliar rupiah pada tahun 2011 atau turun 36,36 persen. Dengan penurunan secara nominal pada tahun 2011, maka kontribusi pembiayaan terhadap penerimaan juga mengalami penurunan dari 15,48 persen pada tahun 2010 menjadi 7,86 persen pada tahun 2011.

II.3. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja tak langsung meliputi bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak tersangka. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Seperti halnya total penerimaan daerah pada realisasi 2011, total pengeluaran juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 naik sebesar 25,34 persen dibanding tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja tak langsung yang meningkat dari 4.414,00 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 5.121,29 miliar

rupiah pada tahun 2011 atau naik sebesar 16,02 persen. Begitu juga belanja langsung mengalami peningkatan yang signifikan dari 3.450,25 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 4.899,50 miliar rupiah pada tahun 2011 atau naik sebesar 42,00 persen. Pada pembiayaan daerah juga mengalami peningkatan sebesar 14,61 persen yaitu dari 1.529,65 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 1.753,10 miliar rupiah pada tahun 2011. Peningkatan ini terjadi karena pada realisasi tahun 2011 mengalami penurunan pengeluaran pada beberapa pos belanja tak langsung, sehingga pada realisasi tahun 2011 mengalami sisa lebih perhitungan anggaran yang berpengaruh pada pengeluaran pembiayaan daerah menjadi naik.

Dilihat dari kontribusinya, belanja tak langsung memiliki kontribusi terbesar dalam pengeluaran daerah, walaupun pada tahun 2011 terjadi penurunan dari tahun 2010 yaitu sebesar 46,99 persen pada tahun 2010 menjadi 43,50 persen pada tahun 2011, ini berarti *share* belanja tak langsung kurang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi belanja langsung pada tahun 2011 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 36,73 persen menjadi 41,61 persen pada tahun 2011. Persentase realisasi belanja baik langsung maupun tidak langsung selalu lebih kecil dibandingkan anggarannya karena naiknya kontribusi pembiayaan dalam realisasinya.

II.3.1. Belanja Tak Langsung

Dari sisi belanja tak langsung, terlihat bahwa distribusi persentase belanja pegawai menyumbangkan peranan yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah yaitu sebesar 38,46 persen pada realisasi tahun 2011, dengan nilai nominal sebesar 3.796,42 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 4.527,79 miliar rupiah pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan 19,26 persen dibandingkan tahun 2010. Sementara distribusi persentase belanja pegawai terhadap total pengeluaran daerah pada realisasi tahun 2010 sebesar 40,41 persen. Sedangkan kontribusi terbesar pada tahun 2011 setelah belanja pegawai berturut-turut adalah belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan masing-masing sebesar 2,72 persen, 1,12 persen, dan 0,67 persen. Sementara kontribusi terbesar pada tahun 2010 setelah belanja pegawai urutannya sedikit berbeda yaitu belanja hibah,

belanja bantuan sosial, dan pengeluaran tak terduga masing-masing sebesar 3,38 persen, 1,10 persen dan 0,98 persen.

Tabel c
Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten
Menurut Jenis Pengeluaran
2010 - 2011

Jenis Pengeluaran	2010	2011
(1)	(2)	(3)
PENGELUARAN	100.00	100.00
Belanja Tidak Langsung	46.99	43.50
1 Belanja Pegawai	40.41	38.46
2 Belanja Bunga	0.04	0.01
3 Belanja Subsidi	0.05	0.07
4 Belanja Hibah	3.38	2.72
5 Belanja Bantuan Sosial	1.10	1.12
6 Belanja Bagi Hasil	0.17	0.18
7 Belanja Bantuan Keuangan	0.87	0.67
8 Pengeluaran Tidak Terduga	0.98	0.27
Belanja Langsung	36.73	41.61
1 Belanja Pegawai	6.88	5.82
2 Belanja Barang dan Jasa	13.71	17.57
3 Belanja Modal	16.14	18.22
Pembiayaan Daerah	16.28	14.89

II.3.2. Belanja Langsung

Berbeda dengan belanja tak langsung, pada belanja langsung terlihat bahwa distribusi persentase belanja modal menyumbangkan peranan yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah yaitu sebesar 18,22 persen pada tahun 2011 dengan nilai nominal sebesar 1.515,80 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 2.145,37 miliar rupiah pada tahun 2011 yang berarti naik 41,53. Sedangkan kontribusi terbesar setelah belanja modal berturut-turut adalah belanja barang dan jasa serta belanja pegawai masing-masing 17,57 persen dan 5,82 persen pada tahun 2011, dengan kenaikan masing-masing sebesar 60,63 persen dan 6,01 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Jika diperhatikan dari angka nominalnya, seluruh jenis belanja langsung

mengalami kenaikan, dan yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal.

II.3.3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah bersumber dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pengeluaran pembiayaan daerah pada 2011 mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.529,65 miliar rupiah pada realisasi tahun 2010 menjadi 1.753,10 miliar rupiah pada tahun 2011 atau naik sebesar 14,61 persen.

II.4. Kesimpulan

Laju pertumbuhan realisasi penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota bukan hanya semata-mata disebabkan oleh laju pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian pemerintah daerah tetap berusaha lebih menekankan komponen PAD dibandingkan komponen lainnya untuk lebih memperkuat kemandirian pemerintah daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan pendapatan daerah.

Kontribusi terbesar dari struktur penerimaan daerah adalah pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana alokasi umum (DAU) yang digunakan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung. Meskipun demikian pada realisasi tahun 2011 kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota. *Pertama*, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, tetapi berada di luar wewenang pemerintah daerah tersebut. *Kedua*, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara optimal, hal ini tercermat dari laba bersih yang dihasilkan jika dilihat dari struktur biaya, asset dan penjualannya. *Ketiga*, rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tercermin dari pendapatan perkapita. *Keempat*, kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Pada realisasi tahun 2011 peranan belanja daerah didominasi oleh belanja tak langsung dimana belanja tak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Dalam struktur pengeluaran daerah, belanja tak langsung menyumbangkan peranan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peranan belanja langsung dengan kontribusi 43,50 persen terhadap total pengeluaran daerah, mengalami penurunan dibanding kontribusi tahun 2010 sebesar 46,99 persen. Sementara belanja pegawai masih menempati urutan tertinggi dari belanja tak langsung atau dari seluruh belanja daerah dengan kontribusi sebesar 38,46 persen.

<http://banten.bps.go.id>

TABEL 1 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMDA KABUPATEN/KOTA
TABLE 1 SELURUH PROVINSI BANTEN MENURUT KABUPATEN KOTA
ACTUAL INCOME AND EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
THROUGHOUT PROVINCE BANTEN BY REGENCY/MUNICIPALITY
TAHUN 2010 DAN 2011
 (Ribu rupiah/thousand rupiahs)

No .	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pendapatan <i>Income</i>	Pembiayaan <i>Financing</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahun 2010				-
1	Kab Pandeglang	936,179,510	38,245,813	974,425,323
2	Kab. Lebak	955,533,629	47,327,050	1,002,860,679
3	Kab. Tangerang	1,638,706,185	807,406,806	2,446,112,991
4	Kab. Serang	949,389,989	165,037,036	1,114,427,025
5	Kota Tangerang	1,338,920,810	366,717,825	1,705,638,635
6	Kota Cilegon	685,599,453	15,711,300	701,310,753
7	Kota Serang	517,574,294	13,356,559	530,930,852
8	Kota Tangerang Selatan	918,193,485	-	918,193,485
Jumlah/Total		7,940,097,355	1,453,802,388	9,393,899,743
Tahun 2011				-
1	Kab Pandeglang	1,220,616,366	41,800,884	1,262,417,250
2	Kab. Lebak	1,185,100,258	102,570,480	1,287,670,738
3	Kab. Tangerang	2,224,307,764	299,061,122	2,523,368,886
4	Kab. Serang	1,322,429,274	117,097,490	1,439,526,764
5	Kota Tangerang	1,839,864,606	294,904,799	2,134,769,405
6	Kota Cilegon	858,320,973	21,485,232	879,806,205
7	Kota Serang	702,985,618	48,346,824	751,332,443
8	Kota Tangerang Selatan	1,494,990,970	-	1,494,990,970
Jumlah/Total		10,848,615,831	925,266,831	11,773,882,661

TABEL 1 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMDA KABUPATEN/KOTA
TABLE 1 SELURUH PROVINSI BANTEN MENURUT KABUPATEN KOTA
(lanj.) *ACTUAL INCOME AND EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT*
THROUGHOUT PROVINCE BANTEN BY REGENCY/MUNICIPALITY
TAHUN 2010 DAN 2011
(Ribu rupiah/thousand rupiahs)

No .	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Belanja <i>Expenditure</i>	Pembiayaan <i>Financing</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
Tahun 2010				
1	Kab Pandeglang	932,878,419	41,546,904	974,425,323
2	Kab. Lebak	894,302,350	108,558,329	1,002,860,679
3	Kab. Tangerang	1,783,508,769	662,604,222	2,446,112,991
4	Kab. Serang	976,467,302	137,959,723	1,114,427,025
5	Kota Tangerang	1,395,733,836	309,904,799	1,705,638,635
6	Kota Cilegon	673,877,265	27,433,488	701,310,753
7	Kota Serang	480,433,095	50,497,757	530,930,852
8	Kota Tangerang Selatan	727,048,024	191,145,461	918,193,485
Jumlah/Total		7,864,249,060	1,529,650,683	9,393,899,743
Tahun 2011				
1	Kab Pandeglang	1,177,381,267	85,035,983	1,262,417,250
2	Kab. Lebak	1,172,548,485	115,122,253	1,287,670,738
3	Kab. Tangerang	2,027,969,741	495,399,145	2,523,368,886
4	Kab. Serang	1,173,463,518	266,063,246	1,439,526,764
5	Kota Tangerang	1,635,673,957	499,095,448	2,134,769,405
6	Kota Cilegon	839,872,748	39,933,457	879,806,205
7	Kota Serang	704,437,307	46,895,136	751,332,443
8	Kota Tangerang Selatan	1,289,438,935	205,552,036	1,494,990,970
Jumlah/Total		10,020,785,957	1,753,096,704	11,773,882,661

TABEL
TABLE 2.1

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Jenis Penerimaan		2010	2011
<i>Receipt items</i>			
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH	7,940,097,355	10,848,615,831
	LOCAL GOVERNMENT RECEIPT		
1.	Pendapatan Asli Daerah	1,129,058,864	2,246,277,774
	<i>Local Government Original Receipt</i>		
1.1.	Pajak daerah	516,578,948	1,537,061,301
	<i>Local Taxes</i>		
1.2.	Retribusi Daerah	274,390,431	339,557,249
	<i>Local Retributions</i>		
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	74,929,828	58,028,404
	<i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
1.4.	Lain-lain PAD yang sah	263,159,657	311,630,820
	<i>Other Local Government Original Receipt</i>		
2.	Dana Perimbangan	5,677,001,123	5,816,208,819
	<i>Balanced Budget</i>		
2.1.	Bagi Hasil Pajak	1,315,904,459	945,917,701
	<i>Tax Share</i>		
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5,464,410	11,476,499
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
2.3.	Dana Alokasi Umum	3,990,689,255	4,459,049,769
	<i>General Allocation Funds</i>		
2.4.	Dana Alokasi Khusus	364,943,000	399,764,850
	<i>Special Allocation Funds</i>		
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1,134,037,368	2,786,129,238
	<i>Other Receipt</i>		
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1,453,802,388	925,266,831
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH / TOTAL		9,393,899,743	11,773,882,661

TABEL
TABLE 2.2

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	4,413,996,187	5,121,290,913
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	3,796,418,021	4,527,786,636
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	3,399,026	1,378,289
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	4,365,060	7,654,895
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	317,479,496	320,648,772
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	102,941,336	132,176,778
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	16,234,721	21,075,426
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	81,334,175	79,166,868
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	91,824,352	31,403,250
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	3,450,252,873	4,899,495,043
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	646,581,676	685,454,855
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1,287,866,479	2,068,667,852
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1,515,804,718	2,145,372,336
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1,529,650,683	1,753,096,704
JUMLAH / TOTAL		9,393,899,743	11,773,882,661

TABEL
TABLE 2.1.1

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Pandeglang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	936,179,510	1,220,616,366
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	31,804,338	56,179,198
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	4,598,186	6,610,547
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	16,988,397	39,085,682
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	8,051,817	6,442,034
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	2,165,938	4,040,935
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	832,302,075	870,685,657
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	46,133,885	49,940,070
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1,740,132	4,981,046
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	695,077,859	723,981,841
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	89,350,200	91,782,700
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	72,073,096	293,751,512
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	38,245,813	41,800,884
JUMLAH / TOTAL		974,425,323	1,262,417,250

TABEL
TABLE 2.2.1

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Pandeglang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	766,633,577	840,086,051
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	694,126,852	787,051,268
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	26,784
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	67,608,499	31,207,237
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	1,520,470	3,304,590
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	3,138,881	8,414,318
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	-	9,906,855
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	238,875	175,000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	166,244,842	337,295,216
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	91,043,624	168,929,873
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	75,201,217	168,365,344
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	41,546,904	85,035,983
JUMLAH / TOTAL		974,425,323	1,262,417,250

TABEL
TABLE

2.1.2

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Lebak

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	955,533,629	1,185,100,258
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	64,752,566	93,065,059
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	6,527,234	14,041,078
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	46,422,446	66,815,311
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	2,756,944	3,123,407
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	9,045,942	9,085,263
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	801,068,805	859,990,345
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	53,621,082	50,575,995
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	666,791	854,169
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	655,633,732	737,431,881
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	91,147,200	71,128,300
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	89,712,258	232,044,855
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	47,327,050	102,570,480
JUMLAH / TOTAL		1,002,860,679	1,287,670,738

TABEL
TABLE 2.2.2

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Lebak

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	583,105,119	649,960,447
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	537,250,685	592,784,547
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	3,267,361	1,351,505
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	17,117,475	23,329,238
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	10,597,757	13,655,670
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	13,095,840	12,661,108
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	1,066,251	1,061,058
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	709,750	5,117,322
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	311,197,231	522,588,037
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	26,620,496	30,680,564
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	115,129,609	244,263,466
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	169,447,126	247,644,007
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	108,558,329	115,122,253
JUMLAH / TOTAL		1,002,860,679	1,287,670,738

TABEL
TABLE 2.1.3

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Tangerang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	1,638,706,185	2,224,307,764
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	354,765,483	665,231,223
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	117,198,221	426,863,508
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	54,709,901	62,162,552
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	24,445,104	17,263,891
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	158,412,257	158,941,272
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1,106,703,700	989,210,733
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	321,056,257	216,287,759
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	549,297	906,082
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	714,568,246	720,492,542
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	70,529,900	51,524,350
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	177,237,002	569,865,808
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	807,406,806	299,061,122
JUMLAH / TOTAL		2,446,112,991	2,523,368,886

TABEL
TABLE 2.2.3

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Tangerang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	840,369,171	914,761,028
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	676,701,230	780,760,800
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	102,402,120	65,776,053
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	23,355,197	19,588,048
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	34,906,951	35,525,228
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3,003,674	13,110,899
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	943,139,598	1,113,208,713
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	137,772,258	134,582,876
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	338,069,358	498,534,653
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	467,297,982	480,091,184
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	662,604,222	495,399,145
JUMLAH / TOTAL		2,446,112,991	2,523,368,886

TABEL
TABLE 2.1.4

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Serang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	949,389,989	1,322,429,274
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	138,817,369	216,956,155
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	41,649,819	91,194,949
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	67,256,628	83,098,037
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	14,903,193	8,611,546
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	15,007,729	34,051,623
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	749,912,485	773,980,563
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	88,123,678	79,146,663
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	649,078	906,083
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	612,446,029	629,377,817
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	48,693,700	64,550,000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	60,660,135	331,492,556
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	165,037,036	117,097,490
JUMLAH / TOTAL		1,114,427,025	1,439,526,764

TABEL
TABLE 2.2.4

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Serang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	639,659,825	691,117,194
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	561,286,911	626,138,190
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	25,507,414	11,488,859
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	20,627,272	31,932,018
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	26,738,237	13,662,473
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	5,499,991	7,895,654
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	336,807,477	482,346,324
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	71,937,470	102,252,046
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	155,369,823	234,812,451
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	109,500,184	145,281,827
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	137,959,723	266,063,246
JUMLAH / TOTAL		1,114,427,025	1,439,526,764

TABEL
TABLE 2.1.5

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	1,338,920,810	1,839,864,606
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	230,634,138	499,080,751
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	159,764,135	418,009,723
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	30,180,376	39,610,720
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	13,663,132	12,515,469
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	27,026,495	28,944,839
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	823,213,829	819,401,102
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	326,163,762	252,820,944
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	518,187	906,082
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	488,979,280	554,055,976
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	7,552,600	11,618,100
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	285,072,843	521,382,753
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	366,717,825	294,904,799
JUMLAH / TOTAL		1,705,638,635	2,134,769,405

TABEL
TABLE 2.2.5

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	598,697,932	717,932,743
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	487,339,238	649,560,943
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	11,522,830	41,061,725
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	17,916,125	22,709,900
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	954,550	954,550
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	80,965,189	3,645,625
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	797,035,904	917,741,214
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	254,739,741	280,290,653
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	228,843,052	313,745,346
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	313,453,111	323,705,215
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	309,904,799	499,095,448
JUMLAH / TOTAL		1,705,638,635	2,134,769,405

TABEL
TABLE 2.1.6

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Cilegon

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	685,599,453	858,320,973
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	150,249,202	253,212,005
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	84,928,181	172,965,160
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	12,971,227	15,473,857
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	11,109,638	10,072,057
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	41,240,156	54,700,930
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	424,673,141	417,147,321
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	145,151,711	96,801,598
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	393,745	906,083
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	279,127,685	315,485,240
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	-	3,954,400
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	110,677,110	187,961,647
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	15,711,300	21,485,232
JUMLAH / TOTAL		701,310,753	879,806,205

TABEL
TABLE 2.2.6

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Cilegon

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	352,976,185	494,769,448
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	291,854,771	406,871,999
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	131,665	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	4,365,060	7,654,895
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	35,124,120	54,729,254
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	17,943,695	23,385,002
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	2,150,000	669,547
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1,406,874	1,458,750
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	320,901,080	345,103,300
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	60,001,382	-
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	136,813,359	183,388,215
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	124,086,339	161,715,084
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	27,433,488	39,933,457
JUMLAH / TOTAL		701,310,753	879,806,205

TABEL
TABLE 2.1.7

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Serang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	517,574,294	702,985,618
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	26,535,747	41,890,335
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	11,929,940	28,955,917
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	10,006,786	7,326,935
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	-	-
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	4,599,021	5,607,482
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	403,362,709	450,999,173
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	40,978,959	36,944,257
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	657,008	1,132,416
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	315,997,942	365,683,500
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	45,728,800	47,239,000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	87,675,838	210,096,111
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	13,356,559	48,346,824
JUMLAH / TOTAL		530,930,852	751,332,443

TABEL
TABLE 2.2.7

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Serang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	279,899,850	337,818,008
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	263,270,284	315,153,822
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	3,787,000	8,811,838
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	6,198,575	5,039,350
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	6,643,992	8,812,998
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	-	-
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	200,533,245	366,619,299
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	29,633,380	47,866,858
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	87,931,054	122,698,223
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	82,968,811	196,054,218
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	50,497,757	46,895,136
JUMLAH / TOTAL		530,930,852	751,332,443

TABEL
TABLE 2.1.8

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang Selatan

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	918,193,485	1,494,990,970
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	131,500,021	420,663,049
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	89,983,231	378,420,418
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	35,854,671	25,984,155
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	-	-
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	5,662,119	16,258,475
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	535,764,379	634,793,926
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	294,675,126	163,400,415
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	290,171	884,538
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	228,858,482	412,540,972
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	11,940,600	57,968,000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	250,929,085	439,533,996
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	-	-
JUMLAH / TOTAL		918,193,485	1,494,990,970

TABEL
TABLE 2.2.8

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2010 - 2011
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang Selatan

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2010	2011
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	352,654,528	474,845,994
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	284,588,051	369,465,067
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	54,410,038	84,244,568
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	4,782,245	12,562,200
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	8,874,194	8,574,159
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	-	-
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	374,393,496	814,592,940
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	65,876,949	89,781,858
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	134,666,600	302,295,626
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	173,849,947	422,515,457
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	191,145,461	205,552,036
JUMLAH / TOTAL		918,193,485	1,494,990,970

<http://banten.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK - PROVINSI BANTEN

Komplek Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Raya Palima Kav. H 1-2, Pakupatan Serang 42171

E-mail : bps3600@bps.go.id Website : <http://banten.bps.go.id>